

# MASALAH PEMBINAAN GENERASI MUDA DILIHAT DARI SEGI SOSIAL BUDAYA\*

I. SUHARNO

## PENDAHULUAN

*Karmany evā dhikāras te  
mā phaleshu kadāchana  
mā karma phala hetur bhur  
mā te sango 'stv akarmani*

*"Kewajibanmu kini hanya bertindak  
bekerja tiada mengharapkan hasil  
jangan sekali pahala jadi motifmu  
jangan pula hanya berdiam-diri jadi tujuanmu"*

*(Bhagavadgita)*

Pada waktu lima puluh tahun yang lalu beberapa pemimpin pemuda kita bersepakat menuliskan huruf-huruf permata pada lembaran emas sejarah Indonesia berupa Sumpah Pemuda, ajaran yang terdapat pada kutipan di atas mungkin sekali tidak menjadi landasan semangat mereka. Tetapi berdasarkan fakta yang dapat kita amati secara historis dan obyektif, jiwa tanpa pamrih serta dinamika yang terarah sebagaimana tersirat dalam

\* Prasaran pada *Lokakarya Nasional Pembinaan Generasi Muda*, Jakarta, 4-7 Oktober 1978. I. SUHARNO adalah dari Lembaga antropologi Universitas Cenderawasih Jayapura

kutipan di atas jelas telah merupakan salah satu sumber utama semangat mereka yang secara berani dan konsekwen telah mereka hayati sepenuhnya. Terbinanya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang telah hidup sampai saat ini tidak dapat dilepaskan dari semangat idealisme tanpa pamrih dan dinamika bertujuan jelas, yaitu merdeka dan mengisi kemerdekaan, dan yang telah melahirkan sendi-sendi pokok Bangsa Indonesia, yaitu UUD 45, Pancasila, dan bangkit serta berkembangnya usaha membina harga diri dan identitas kepribadian nasional sebagai bangsa warga dunia yang terhormat, tertib, dan beradab. Idealisme yang diwarnai oleh kepentingan pribadi atau golongan tiada lain adalah egosentrisme atau kelompokisme yang sempit, sedangkan idealisme tanpa dinamika tidak lebih dari suatu impian. Dikotomi idealisme dan dinamika ini akan sering tersirat dalam prasaran ini.

Sosial budaya manusia adalah totalitas tingkah laku manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat dan dunia arti serta nilai-nilai kehidupannya yang dicerminkan oleh tingkah laku itu baik secara verbal (kebahasaan) maupun non-verbal, serta baik secara overt (nampak) maupun covert (tersirat/tak tampak) (lihat Linton, 1936, dan Pike, 1956). Apabila terdapat suatu equilibrium (kemantapan) dan keserasian (harmony) antara tingkah laku dan dunia arti/nilai-nilai hidup pada suatu masyarakat, maka kita dapat berkata bahwa masyarakat tersebut telah mencapai stabilitas dalam kehidupan sosial-budayanya.

Kemantapan dan keserasian hubungan antara dunia nilai dan tingkah laku manusia ini agar dapat hidup subur memerlukan dua syarat pokok, yaitu kesemestaan (universalisme) nilai-nilai dan tingkah laku yang mencerminkannya dalam dunia permukaan, dan keanekaragaman (differentialisme) sikap serta cara hidup sebagai ungkapan kebebasan individu yang secara khas masih diikat lagi oleh adat istiadat masyarakat di mana ia menjadi anggotanya. Dalam konteks Indonesia, apabila yang pertama itu dapat kita katakan nilai-nilai nasional yang stabil tetapi juga progresif dan reseptif terhadap perkembangan-

perkembangan baru tanpa mempengaruhi kaidah-kaidah pokoknya, maka yang kedua dapat kita katakan sebagai kaleidoscope Bhinneka Tunggal Ika yang selalu bergerak dinamis memberi aneka warna khas Indonesia pada nilai-nilai semestanya.

Realita semesta ini pada masyarakat menyangkut apa yang menurut T.H. Huxley dan Julian Huxley, 1947, dinamakan sistem ethos. Sistem ethos ini, baik yang intuitif (individual), naturalistis (moralitas warisan dan biologis), maupun evolusioner (dinamis karena kemajuan ilmu pengetahuan dan alam pikir manusia) tidak lain merupakan kendali kehidupan masyarakat. Kita sepatutnya merasa bersyukur bahwa sumber trilogi ethos nasional telah kita miliki dan terpateri sejak Bangsa Indonesia merdeka dalam UUD 45 dan Pancasila.

Kalau kita lihat dari jaman kini, idealisme para pemimpin pemuda 50 tahun yang lalu sudah merupakan untaian nilai-nilai kehidupan nasional, yang secara mantap dan serasi dicerminkan oleh dinamika tingkah lakunya, yaitu yang secara verbal berupa kalimat-kalimat Sumpah Pemuda itu sendiri dan secara non-verbal dicerminkan oleh tindakan serta perjuangan bangsa Indonesia yang terus menerus dilakukan sampai saat ini. Secara overt baik tingkah laku verbal maupun non-verbal sebagai konsekuensi Sumpah Pemuda itu telah menjadi kenyataan sejarah. Sedangkan secara covert tingkah laku bangsa Indonesia telah selalu terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya yang sebagaimana halnya dengan lunas kapal berfungsi sebagai ballast (pemantap) atau stabilisator arah kehidupan sosial budaya Indonesia, yang sering mengalami tubrukan dengan arus nilai-nilai lain. Arus semacam ini bisa berasal dari dalam berupa kekuatan nilai-nilai destruktif ekstrim kiri (perpecahan, sukuisme, pemberontakan DI—TII, Pemberontakan PKI Madiun, G30S/PKI, liberalisme, gerakan *campus-is-a-sacred ground*, dan sebagainya) dan juga yang berupa kekuatan nilai ekstrim kanan (sikap *yesmen*, *Bapak can do no wrong*, Barisan Pendukung Soekarno, dan sebagainya). Di samping itu tidak bisa diabaikan adanya arus pengaruh sosial budaya dari luar. Arus dari luar ini tidak bisa dihindari kederasan persentuhannya dengan nilai-nilai sosial

budaya Indonesia karena majunya teknologi dan sistem komunikasi, ilmu pengetahuan (antara lain baru-baru ini dengan ditemukannya cara untuk mempengaruhi DNA, bayi tabung percobaan, perkandungan dengan inseminasi, operasi plastik dan perubahan kelamin), dan meningkatnya mobilitas manusia. Untunglah baik secara negatif, yaitu a priori hati-hati atau bahkan curiga, maupun secara positif, yaitu rasionil dan analitis, nilai-nilai sosial budaya Indonesia bagaikan jangkar idealisme nasional telah selalu menyaring pengaruh-pengaruh yang merugikan dan dengan demikian telah menyelamatkan bangsa kita. Dalam penyelamatan ini tidak dapat diabaikan peranan generasi tua, baik ia ABRI maupun sipil, yang dengan bantuan serta dinamika generasi muda, telah menjadi pelaku dan pengarah pertahanan dan penyelamatan nilai-nilai sosial budaya nasional. Sesungguhnya, fungsi generasi muda sebagai peserta dan penghayat dinamika serta fungsi generasi tua sebagai jangkar dan kemudi memegang nilai-nilai idealisme itu selalu sejajar dan kait mengait. Tetapi kita tidak dapat menutup mata kepada kenyataan-kenyataan, yang baik dengan sengaja atau tidak telah timbul dalam kehidupan masyarakat kita bahwa *jurang perbedaan*, dan bukannya *keserasian hubungan* antara generasi tua dan generasi muda sering lebih dibesar-besarkan.

Idealisme sosial budaya bangsa Indonesia sebagai isi dunia arti serta nilai-nilai kehidupannya secara jelas telah dituangkan dalam GBHN sebagai isi Tap MPR No. IV/1978 khususnya Bab III B No. 15 b paragraf kedua, yang berbunyi : "Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari Manusia Budaya Indonesia sebagai pendukungnya." Demikian pula dalam Bab IV di bawah judul : AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA beberapa paragraf pada nomor : 3. Kebudayaan disebutkan antara lain : "a. Nilai budaya Indonesia terus dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkukuh jiwa kesatuan

## ANALISA

nasional. b. Kebudayaan nasional terus dibina atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur. Dalam pada itu perlu ditiadakan dan dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit. c. Dengan tumbuhnya kebudayaan nasional yang berkepribadian dan berkesadaran maka sekaligus dapat ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan, d. Disiplin nasional dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam usaha untuk memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan prasaja, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kewiraan''.

Idealisme yang indah itu tidak akan ada artinya apabila ia tidak diwujudkan berupa tingkah laku yang serasi dan sesuai, dan pelaku tingkah laku ini sebenarnya juga sudah didefinisi dalam Tap MPR yang sama di bawah judul seperti di atas, yaitu no. 10 Generasi Muda dan no. 11 Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa.

Oleh karena itu prasaran ini tidak akan melepaskan dirinya dari gagasan-gagasan pokok sosial budaya Indonesia sebagai landasan yang tidak dapat ditawar-tawar, dan juga dari dinamika terarah sebagai ciri, mutu, dan mekanisme pelaksanaan gagasan-gagasan tersebut.

## NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA INDONESIA

### **Masalah Identitas**

Dalam dunia pengalaman manusia, akibat pengamatan dan keumuman (generalisasi) karena gejala-gejala atau pola-pola mirip dan bahkan kadang-kadang identik yang muncul berulang-

ulang, secara hampir harafiah dapat dikatakan telah sering timbul penilaian-penilaian stereotipis. Stereotipe ini kadang-kadang lucu tetapi kadang-kadang cukup serius untuk dipertimbangkan. Pada tahun 1933, dua orang sarjana Barat, yaitu Katz dan Braly, mulai merintis penelitian tentang stereotipe mahasiswa di Amerika Serikat berdasarkan latar-belakang etnisnya. Secara awam seringkali kita mendengar kesan orang Barat tentang orang Indonesia, yaitu antara lain bahwa orang Indonesia selalu tersenyum, dan bahwa amat sulit untuk mengetahui apakah senyuman orang Indonesia itu merupakan tingkah laku overt non-verbal yang mencerminkan dunia arti yang positif atau negatif.

Anecdote kecil semacam itu sebenarnya dapat mempunyai implikasi yang cukup luas, yaitu berupa pertanyaan, antara lain, "Apakah dan bagaimanakah identitas sosial budaya Indonesia itu?" Di samping itu bisa timbul pertanyaan di mana batas-batas daerah pengertian sosial dan daerah pengertian budaya. Beberapa ahli menyangkan adanya kekurang-pekaan terhadap perbedaan sosial dan budaya Indonesia. Menurut Bachtiar 1978: "..... perbedaan antara sistim budaya dan sistim sosial (di Indonesia) kurang diperhatikan ....." (dalam kurung persegi tambahan saya I.S.). Menurut pendapat saya, meskipun sistem budaya dan sistem sosial Indonesia dapat dilihat sebagai dua hal yang dapat dibedakan, tetapi bagaikan dua muka sehelai kertas atau dewa Yunani Kuno Janus, kedua sistem itu integral dalam kehidupan Indonesia dan tidak dapat dipisah-pisahkan tanpa mengurangi arti keseluruhan sosial budaya Indonesia sebagai identitas nasional. Secara logis pendapat itu saya akui masih berupa *petitio principii*, yaitu mempertanyakan pertanyaan semula, yaitu : apakah identitas sosial budaya Indonesia itu, tanpa memberi jawaban yang kena.

Memberi definisi identitas sosial budaya Indonesia sama sulitnya seperti usaha memecah batu permata kasar untuk digosok menjadi intan dengan bentuk yang diinginkan serba sempurna. Sejak van Eerde 1920 sampai Mochtar Lubis 1977 usaha memberi definisi manusia Indonesia sebagai pelaku sosial budayanya telah merupakan usaha yang meskipun patut dihargai

tetapi belum berhasil memberikan jawaban yang terperinci dan jelas tentang apa yang dimaksud. Bahkan usaha-usaha semacam itu biasanya mengundang timbulnya pertikaian pendapat. Pertikaian pendapat ini tidak dapat dihindarkan, oleh karena kalau definisi-definisi tersebut hanya didasarkan atas penelitian atau pengamatan terhadap tingkah laku sebagai *das Sein* tanpa asumsi dasar nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang disetujui bersama sebagai *das Sollen*, tercapainya definisi tentang sosial budaya Indonesia tersebut akan berhenti pada suatu identitas kulit atau semu, serta berakhir pada kejenuhan yang mandek (stereotipis) dan tak berguna. Pada hal, satu-satunya asumsi dasar yang patut dan secara resmi dapat kita pakai justru mencerminkan tidak mungkinnya kita berhenti pada stereotype dangkal tentang manusia Indonesia dan sosial budayanya. Asumsi dasar ini tidak lain adalah UUD 45 dan Pancasila yang dicerminkan oleh kebhinneka-tunggal-ikaan bangsa Indonesia dalam berbagai tingkah lakunya. Dengan kata lain, apabila kita menerima asumsi dasar ini sebagai pegangan yang benar, maka salah satu jalan yang paling baik untuk membentuk identitas sosial budaya Indonesia ialah membina penyerasian hubungan tingkah laku manusia Indonesia (baik verbal, non-verbal, overt, maupun covert) *sesuai* dengan dunia arti, cita-cita, dan nilai-nilai kehidupan nasional sebagaimana tertera pada UUD 45, Pancasila, dan pedoman umum penjabarannya sebagaimana tertera dalam GBHN. Ini jelas menyangkut pembinaan manusia Indonesia, tidak saja khususnya generasi muda, tetapi juga generasi tua yang harus memberi suri teladan dan bimbingan yang tepat untuk usaha penyerasian hubungan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai nasional ini. Ini bukan masalah gampang. Oleh karena ia menyangkut terbentuknya persetujuan secara luas pada seluruh bangsa Indonesia. Dari lahirnya Tap-tap MPR kita bisa memetik pelajaran, bahwa penyesuaian tingkah laku dengan nilai-nilai nasional masih terus memerlukan pertukaran pendapat, perdebatan, pembinaan, pengamanan kebijaksanaan, toleransi dan komunikasi yang efektif.

Oleh karena dalam jaman moderen ini Indonesia tidak dapat mengisolir dirinya dari pengaruh-pengaruh yang berkembang dari dalam dan yang datang dari luar, masalah identitas

sosial budaya Indonesia ini akan merupakan spektrum khas yang bergerak dinamis. Kalau dinamika ini berhenti, sosial budaya Indonesia akan membeku menjadi sosial budaya negara Utopia yang tidak pernah ada. Kiranya hal ini tidak akan terjadi. Tetapi kewaspadaan akan timbulnya kekacauan identitas juga tidak boleh diabaikan. Jadi, identitas sosial budaya Indonesia adalah identitas yang mencerminkan nilai-nilai nasional sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45, Pancasila, dan GBHN dan terungkap oleh tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai itu. Tentu saja identitas ini merupakan kesatuan distinktif berbeda dengan identitas sosial budaya bangsa lain. Perbedaan ini bukan saja karena sebagai kesatuan ia *sui generis*, yaitu dari sendirinya berlainan dari yang lain, tetapi lebih-lebih karena bagaikan intan ia terdiri dari berbagai faset sosial budaya yang masing-masing merupakan himpunan sub-faset lagi yang dengan demikian memberi warna khusus kepada identitas ini. Ini seyogyanya jangan sampai hanya dipahami dan disadari oleh para cendekiawan saja, tetapi harus disebar-luaskan ke kesadaran seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan demikian sumber-sumber stereotipe yang mungkin berasal dari dalam karena ketidaktahuan (*ignorance*) dapat ditiadakan sedini mungkin. Ketidaktahuan tidak selamanya menjadi monopoli masyarakat yang terbelakang. Sebagai contoh, misalnya, sering terdengar anggapan bahwa sosial budaya masyarakat Irian Jaya adalah itu-itu saja, yaitu terbelakang, "primitif", liar tak teratur, dan sama di mana-mana. Padahal kalau kita amati dengan teliti (lihat misalnya Gerbrands, 1967a, dan Gerbrands 1967b), dalam salah satu kelompok masyarakat saja terdapat variasi-variasi dari yang sangat halus (*subtle*) sampai yang sangat menyolok. Ini baru mengenai ukiran kayu. Contoh generalisasi yang dilakukan oleh van Eerde dan Mochtar Lubis menunjukkan betapa para ahli pun sering tidak mengetahui dengan persis adanya variasi-variasi yang terdapat dalam masyarakat dan yang tidak memungkinkannya membuat generalisasi terlalu luas. Demikianlah tentang masyarakat Jawa, yang sering kali dikatakan sebagai seragam di mana-mana, terbukti akan menunjukkan variasi-variasi yang cukup distinktif. Ambil saja misalnya, dari segi verbal, kata untuk "bola lampu listrik" dan misalnya juga, dari segi non-verbal, adat perkawinan. Dari ujung

## ANALISA

barat pulau Jawa sampai ke Banyuwangi akan dibuktikan, bahwa variasi-variasi ada pada dua contoh kecil ini. Sebagai kesimpulan, identitas sosial budaya Indonesia akan tetap mantap apabila ia didasarkan pada idealisme yang sama, yaitu nilai-nilai nasional yang disebutkan di atas, dan dinyatakan dalam kebhinneka-tunggal-ikaan pengungkapan dan variasi nilai-nilainya.

### Pengembangan Nilai Sosial Budaya

Dalam tiap masyarakat, pengembangan nilai-nilai sosial budaya selalu menyangkut proses kompleks penyampaian, penerusan, atau pewarisan nilai-nilai tersebut baik secara eksplisit maupun implisit, baik secara moderen maupun kuno/tradisionil, yang terjadi antara generasi tua dan generasi muda. Batas definitif antara generasi tua dan generasi muda meskipun tidak selalu jelas tetapi pada umumnya dapat dianalisa eksistensinya. Di beberapa kalangan tertentu, pengertian generasi muda itu sering dibatasi, demi suatu relevansi tertentu, secara umum, tetapi sekaligus juga secara sempit. Misalnya : "Pada umumnya golongan muda yaitu mereka yang berumur di bawah 30 tahun memegang peranan penting hanya pada saat-saat tertentu." (Onghokham 1977:15). Batasan yang dibuat dengan hati-hati ini tidak cukup jelas melihat pentingnya fungsi dan proses kompleks penerusan dan pewarisan nilai-nilai sosial budaya yang menyangkut baik generasi tua maupun generasi muda. Dengan membenarkan pendapat Hegel tentang *progress* yang terdiri dari Thesis, Synthesis, dan Antithesis, Whitehead 1960:27—40, melihat bahwa dalam pendidikan anak sejak kecil terdapat tahap-tahap perkembangan jiwa anak mulai dengan tahap romantika, tahap presisi, dan tahap generalisasi, yang batas-batasnya secara keumuran sengaja ia tolak untuk menentukannya. Dengan mengingat proses transfer nilai-nilai sosial budaya manusia penahapan perkembangan jiwa anak ini nampaknya lebih sesuai untuk memberi definisi generasi muda dari bawah ke atas, yaitu sejak ia lahir sampai ia secara bertanggungjawab dapat mempergunakan ketrampilan, kepercayaan akan dirinya sendiri, kematangan serta kewibawaannya untuk membimbing dan mengarahkan generasi yang lebih muda.

Demikianlah sebaliknya, dalam pengertian ini generasi tua adalah kelompok manusia yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dengan kata lain pula, suatu aspek penting dari kebudayaan yang bernama pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses hubungan timbal balik antara generasi tua dan generasi muda yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai sosial budaya manusia. Jadi, secara umum pula dapat dikatakan bahwa fungsi pendidikan mulai jelas dan mempunyai nilai yang menentukan sejak seorang bayi lahir di dunia.

Apabila kita perhatikan konsepsi dasar mengenai nilai-nilai sosial budaya yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya sebagaimana tertera secara umum dalam UUD 45, Pancasila, dan GBHN, dan di lain pihak kita juga memperhatikan realita multifaset yang terdapat dalam masyarakat di seluruh Indonesia, maka pernyataan secara umum mengenai fungsi pendidikan sebagai sarana pengembangan nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang disebut di atas perlu dilengkapi dengan konsepsi operasional yang bermanfaat dan memudahkan proses kompleks pengembangan dan penerusan serta pewarisan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Konsepsi operasional ini perlu, oleh karena tingkat kehidupan dan ragam kemajuan masyarakat di Indonesia berbeda-beda. Di Irian Jaya, misalnya, terdapat suatu kenyataan yang khas. Kekhasan daerah Irian Jaya ialah adalah generasi muda yang dinamis dan peka terhadap perubahan dan generasi tua yang statis dan kurang peka terhadap perubahan. Meskipun demikian, secara materialistis baik generasi tua maupun generasi muda mempunyai kemiripan-kemiripan, yaitu antara lain, berupa antusiasme untuk menikmati benda dan hasil teknologi modern (*finished products*) berupa berbagai barang yang dengan cepat dapat didatangkan dengan pesawat udara. Demikian pula terhadap fasilitas dari pemerintah maupun pihak misionaris, baik generasi tua maupun generasi muda mempunyai minat materialistis yang serupa. Oleh karena itu konsepsi operasional yang diterapkan di Irian Jaya untuk merubah sikap melalui pendidikan, misalnya, yang diarahkan kepada generasi tua akan kecil artinya, kalau malah tidak dapat dikatakan sia-sia belaka, sebab generasi tua ini hampir secara keseluruhan ingin mempertahankan nilai-nilai lama,

banyak di antaranya bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran jangka panjang, masa depan di Irian Jaya hampir seutuhnya dapat diletakkan pada pundak generasi muda, dan oleh karenanya, pendidikan, baik formil maupun non-formil, sebaiknya dititikberatkan pada generasi mudanya. Dengan demikian pendidikan semacam ini secara konseptual dan operasional menuntut sifat-sifat yang berbeda dengan yang dilakukan di daerah lain, khususnya apabila di daerah atau bahkan lapisan masyarakat lain itu mencakup generasi tua yang lebih maju pikirannya.

Namun bagaimanapun juga, proses pendidikan sebagai usaha pengembangan nilai-nilai sosial budaya, baik di Irian Jaya, Kalimantan, maupun di Jakarta, menuntut tidak saja relevansi yang sesuai agar generasi muda dapat menghadapi masa depan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga prasyarat agar generasi muda tidak kehilangan identitas atau kebanggaan serta harga dirinya karena kehilangan akar, yaitu hubungan dengan warisan kebudayaan dan nilai-nilai sosial leluhurnya.

Apabila pusat pandangan tentang warisan sosial-budaya ini semata-mata hanya terbatas pada nilai-nilai daerah, maka ia akan sempit dan merugikan. Sebaliknya, apabila ia mutlak terikat oleh hirarki vertikal yang dikomandokan dari atas ke bawah dengan slogan semu : demi kepentingan nasional, maka ia dapat menimbulkan kritik bahkan konflik sosial budaya. Sekali lagi, apabila pengembangan nilai-nilai sosial-budaya melalui pembinaan generasi muda tidak dilakukan dengan dan oleh orang-orang yang hati-hati dan moderat, kemungkinan timbulnya akibat yang tidak diharapkan, yaitu sikap bahkan gerakan ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tidak dapat kita abaikan.

### **Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Nilai-nilai Sosial Budaya**

Pengembangan nilai-nilai sosial budaya nasional tidak dapat dilepaskan dari peranan orang-orang tua atau lembaga-lembaga

yang mempunyai pengaruh, wibawa, dan kekuasaan serta fasilitas untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengarahkan pelaksanaan pengembangan itu. Suka atau tidak suka, peranan "the ruling class" (Mosca 1939) berlaku di mana-mana. Menurut pandangan Gaetano Mosca yang berkembang pada abad yang lalu itu, makin sederhana tingkat organisasi masyarakat, peranan orang yang mempunyai dukungan kekuatan fisik makin tinggi dalam menentukan arah kebijaksanaan masyarakat tersebut. Apabila konsepsi "the ruling class" ini dikembangkan secara militan, maka kita menemui ekstrimitas-ekstrimitas. Yang paling menyolok ialah telah disalahgunakannya gagasan "the ruling class" ini untuk membentuk landasan gagasan bagi terciptanya fasisme Italia yang destruktif itu. Gaetano Mosca sebenarnya juga melihat kekuatan-kekuatan sosial yang dapat mengendalikan atau meluruskan arah "the ruling class" itu, sehingga tercapailah situasi yang baiklah kita sebut "the ruling class rules by the rules of the ruled." Hal ini hanya mungkin terjadi apabila "the ruling class" bersikap moderat tetapi kuat, receptive tetapi memegang prinsip-prinsip terarah, dan mempunyai rencana kerja yang mantap dan didukung oleh tersedianya daya ahli dan dana yang memadai, dan memencarkan perhatiannya secara adil proporsional.

Sebagaimana disebut di muka, secara fundamental masalah pengembangan nilai-nilai sosial budaya Indonesia melalui pembinaan generasi muda telah jelas tertuang dalam GBHN. Tetapi bagaimanapun fundamentalnya dan jelasnya masalah-masalah tersebut bagi pemerintah dan para cendekiawan, apabila tidak terdapat komunikasi yang memadai, bebas dan fleksibel antara Pemerintah dan masyarakat secara timbal balik, ganjangan-ganjalan bagaikan "centeng tidur" di dekat proyek perbaikan jembatan bisa timbul di mana-mana. Salah satu jalan terbaik yang dapat ditempuh untuk menghindari gejolak akibat ganjangan-ganjalan ini ialah memberi akomodasi sejauh mungkin kepada berbagai lembaga nonpemerintah maupun pemerintah yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi sepenuh dan sejauh mungkin tidak saja untuk mendiskusikan, melokakaryakan, serta melaksanakan perencanaan pengembangan nilai-nilai sosial

budaya melalui pembinaan generasi muda tersebut, tetapi juga untuk menghayati dan mengawasi pelaksanaannya sebagai pengarah dan sumber dinamika agar pembinaan ini tidak berjalan terantuk-antuk dan menurut berhembusnya angin pengaruh tertentu. Pihak Pemerintah Orde Baru, khususnya yang sekarang ini, sudah giat dan terus meningkatkan kegiatannya menempuh jalan ini. Tetapi nampaknya masih perlu dibina suatu *consensus omnium* yang jauh lebih luas lagi. Oleh karena itu saya sarankan dalam prasaran ini agar dalam sidang-sidang komisi nanti dapat dirumuskan jalan yang semaksimal mungkin mantap. Hal ini akan membantu peranan Pemerintah dalam mengembangkan nilai-nilai sosial budaya Indonesia serta membina generasi muda secara berhasil bukan saja karena usahanya didasarkan atas otoritas atau kewibawaan "the ruling class" secara vertikal, tetapi juga atas kolegalitas horisontal, yaitu di mana kewibawaan dan otoritas selalu dipahami dengan rasa penuh pengertian dan toleransi serta dilandasi oleh hubungan mesra. Dengan cara ini Pemerintah dan masyarakat dalam banyak hal merupakan sejawat untuk tujuan yang sama: yaitu meningkatkan relevansi tingkah laku atau dinamika pembangunan yang sesuai dengan landasan serta dunia arti yang diterima dan dipahami bersama.

## PEMBINAAN GENERASI MUDA INDONESIA

### **Peranan Orang Tua dalam Keluarga**

Entah kejadiannya benar atau tidak, Remy Sylado 1977 secara tajam ngilu menyatakan kekesalannya terhadap sikap dua orang ibu penyanyi-penyanyi pop yang bersikap lebih (saya kutip Remy Sylado) "ngepop" dari anaknya yang bagaimanapun pop, modern, dan Inggris nyanyinya, pakaiannya, serta tingkah lakunya tetap berlatar belakang sosial budaya Melayu Sidoarjo dan Semarang. Mungkin sekali contoh ini adalah contoh paling ekstrim, yang menunjukkan bahwa generasi tua ikut bertanggungjawab dalam meningkatkan kecepatan irama "modern" tingkah laku, dan juga nilai-nilai hidup, generasi muda. Tetapi contoh lain juga disebut oleh Sudjoko 1977 bahwa

dari segi tertentu pihak generasi tua bersikap antipatik dan pasif terhadap citarasa dan tingkah laku generasi muda, yang justru seharusnya bisa dihayati dan dinikmati oleh generasi tua. Bagaimanapun juga, kehadiran atau absensi perhatian serta dorongan orang tua ini tidak bisa melepaskan tanggungjawabnya dari peran yang dilakukannya dalam hidup bersama dengan generasi muda.

Dalam rumusan sistem pendidikan Taman Siswa, terdapat suatu model (teladan) pendidikan yang bisa digambarkan sebagai persilangan poros vertikal di mana otoritas generasi tua terasa kuat dan poros horisontal di mana kolegialitas antara generasi tua dan generasi muda lebih menonjol. Gambaran itu sebagai berikut :

1.	Ing ngarsa	asung tuladha
2.	Ing madya	amangun karsa
3.	Tut wuri	handayani

Hubungan 1. *Ing ngarsa asung tuladha* (apabila di depan memberi teladan) dan 3. *Tut wuri handayani* (apabila berada di belakang tetap dapat mengemudikan generasi muda) merupakan hubungan di mana sifat aktif dan mengawasi serta menuntun cukup besar berada di tangan generasi tua, oleh karena itu untuk mudahnya hubungan tersebut dinamakan hubungan atau poros vertikal. Sebaliknya, 2. *Ing madya amangun karsa* (apabila berada bersama dengan generasi muda generasi tua berusaha membangkitkan kemauan atau semangat), merupakan perspektif horisontal, di mana hubungan antara orang tua dan anak ditandai oleh adanya semangat kolegialitas, meskipun di sini juga secara eksplisit orang tua disebut sebagai pembangkit kemauan.

Dalam lapisan masyarakat yang telah agak maju dan mempunyai tata serta kebiasaan hidup teratur dan disiplin, kedua perspektif itu, yaitu yang vertikal maupun yang horisontal, dapat dilaksanakan dengan hambatan yang relatif kecil. Tetapi pengaruh hidup moderen juga telah memainkan peranan dalam

## ANALISA

mengadakan modifikasi sifat dan pelaksanaan kedua perspektif itu. Dengan makin mobilnya generasi tua dan generasi muda dalam lapisan masyarakat yang telah agak maju ini kontak-kontak untuk melaksanakan dua perspektif tersebut menjadi makin jarang. Orang tua makin lama berada di luar rumah, demikian pula halnya dengan anak-anaknya. Apalagi dengan meningkatnya mobilitas karena meningkatnya sistem komunikasi/transportasi serta kemampuan bergerak (dengan pemilikan mobil, motor, uang untuk naik bis, taxi, pesawat terbang, dan kapal), persentuhan nilai-nilai keluarga dengan nilai-nilai dari luar keluarga menjadi makin meningkat juga.

Di samping itu peranan orang tua sering kali menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan secara harafiah, oleh karena timbulnya nilai-nilai baru secara nasional. Dalam menghadapi program KB, di satu pihak orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dengan cara yang tepat sejalan dengan nilai baru ini, dan di pihak lain ia harus waspada akan penyalahgunaan mekanisme dan arti dari landasan pokok program KB. Di kota-kota besar hal ini masih ditambah lagi dengan timbulnya gejala penyalahgunaan narkotika, penyebaran bahan-bahan pornografis atau terlarang, penyajian iklan di mana-mana yang merangsang imajinasi sex, beredarnya film-film "wajar" dan "realistis" yang ditandai oleh adanya adegan kamar tidur, dan sebagainya. Dalam keadaan-keadaan seperti ini peranan orang tua tidak saja menjadi lebih berat, tetapi juga lebih kompleks. Andaikata keadaan di seluruh Indonesia memang demikian, maka peranan orang tua yang paling maksimal dapat dilakukan ialah dimensi yang paling lemah dalam persilangan dua perspektif itu, yaitu "Tut wuri handayani", yang sekarang lambangnya telah tersebar di seluruh Indonesia.

Tetapi apabila prinsip ini merupakan satu-satunya pegangan dan terlepas dari kedua prinsip yang lain itu, maka sesungguhnya telah dapat kita katakan bahwa perubahan sikap generasi tua dalam pendidikan telah berubah secara fundamental, yaitu ia menjadi *permisif*. Hal ini tentunya bukan yang dikehendaki oleh kita semua. Oleh karena itu Pemerintah kiranya perlu meningkatkan kewibawaan orang tua dalam keluarganya dengan

menekankan perlunya ketiga-tiga prinsip itu secara proporsional, sesuai dengan kondisi dan taraf kehidupan masyarakat di mana keluarga itu berada.

Di samping itu semua, sistem reesuksi bagi orangtua perlu diperhatikan, oleh karena tanpa reedukasi ini jurang pemisah antara generasi tua dan generasi muda bisa makin menjadi lebar. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Eka Budianta, 1978, bahwa orang tua perlu merubah dirinya demi kepentingan masa depan anak-anaknya. Ia mengusulkan, antara lain, agar dilakukan "..... penataran dan pemanfaatan media komunikasi massa secara seefektif mungkin." Di beberapa negara yang sudah maju masalah ini dipecahkan dengan antara lain mempergunakan program yang disebut "Family Encounters", yang biasanya dilakukan di motel, di mana sesudah seluruh pasangan suami-isteri mendapat bahan-bahan baik berupa ceramah, diskusi, maupun bacaan mereka dapat saling berhadapan sendiri-sendiri di kamar masing-masing, melakukan intro dan retrospeksi terhadap fungsi mereka sebagai suami isteri dan orang tua. Dengan modifikasi seperlunya, meskipun masih dalam tahap yang sangat terbatas, hal seperti ini bisa dimulai terutama di daerah-daerah kota besar yang tidak saja menunjukkan gejala tabrakan pandangan antara generasi tua dan generasi muda secara relatif lebih besar, dari pada di kota-kota kecil, tetapi yang biasanya juga mempunyai fasilitas yang relatif lebih memadai untuk keperluan ini. Dalam program semacam ini, antara lain, yang perlu diperhatikan adalah peranan keserasian (harmoni) dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Ini sangat bermanfaat dan berpengaruh guna membina optimisme pada generasi muda. Kenakalan atau kejatuhan anak ke jurang hidup yang gelap akibat broken homes bukan lagi menjadi imajinasi pengarang novel atau ceritera pendek. Kita menemuinya dalam kehidupan nyata di mana-mana. Juga sikap terbuka orang tua akan memainkan peranan penting bagi anak-anaknya untuk mengembangkan sikap kritis, analitis, kreatif, dan dinamis.

Sebenarnya yang menjadi masalah dalam pembinaan orang tua atau generasi tua ialah program apa yang dapat dilakukan di

daerah-daerah pedesaan, yang jumlahnya jauh lebih besar daripada daerah kota. Ini sangat terasa di Irian Jaya, misalnya, di mana prinsip *tut wuri handayani* tidak akan besar manfaatnya. Di daerah-daerah semacam ini justru prinsip yang pertama, yaitu *ing ngarsa asung tuladha* secara intensif dan penuh dedikasi harus diutamakan. Peranan Pemerintah di daerah-daerah semacam ini jauh lebih berat daripada di tempat-tempat di mana masyarakatnya telah tinggi kesadarannya untuk membantu program pendidikan, penyuluhan, dan pembangunan pada umumnya. Apabila daerah-daerah semacam ini masih di luar jangkauan administrasi pemerintah, sebagaimana halnya yang terdapat di Irian Jaya, maka badan-badan nonpemerintah, apakah ia misi atau pengusaha sumber kekayaan alam, sepatutnya diberi beban dan tanggung jawab ikut membantu program pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dengan cara yang khusus lain dengan cara yang dipakai di daerah yang sudah agak maju, program yang harafiah berupa *tuntunan* bagi masyarakat itu tetap harus dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai sosial budaya nasional dan melestarikan nilai-nilai daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai nasional, serta secara praktis dan relevant segera dapat dilihat hasilnya, masyarakat yang masih sederhana itu dididik dalam ketrampilan praktis. Merubah masyarakat yang masih berkoteka untuk menjadi masyarakat berbusana tanpa merubah keadaan-keadaan yang lain (cara membuat rumah, memelihara babi, membuang kotoran, dan sebagainya) tidak akan pernah dapat dilakukan dalam jangka pendek. Sejarah telah membuktikan hal ini. Khususnya di daerah-daerah seperti di pedalaman Irian Jaya, perubahan sikap melalui pembinaan generasi muda tidak akan berhasil apabila program pendidikan konvensional (melalui SD, SMP, dsb.) diprioritaskan tanpa memberi jalan keluar pada apa yang terjadi pada masa yang akan dihadapi anak-anak sesudah mereka lulus sekolah. Di daerah-daerah semacam ini pola sekolah nasional secara konvensional perlu dimodifikasi sehingga program yang diterapkan sungguh-sungguh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

## Peranan Sekolah

Sebagai suatu negara kepulauan yang terletak di persilangan lalu lintas internasional, Indonesia menghadapi tuntutan untuk maju dan membentuk sikap baru secara cepat tanpa kehilangan identitasnya. Sejak jaman Orde Lama diganti oleh Orde Baru, perubahan keadaan dari serba melarat di mana-mana menjadi keadaan yang jauh lebih baik nampak nyata dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Tetapi ada manfaatnya apabila kita menanyakan kepada kita sendiri, apakah kemajuan di bidang materiil itu juga diimbangi oleh apa yang disebut oleh Toffler, 1972, sebagai "psychic gratification" (kepuasan mental) yang justru sekarang ini menjadi kebutuhan yang dikejar-kejar dan dicari di negara-negara yang sudah sangat maju. Beberapa kali kita mendengar bahwa kemajuan yang berdasarkan teknologi atau *cyberculture* pada akhirnya akan tertumbuk pada tembok penghalang yang riil dalam kehidupan manusia, yaitu *kebutuhan manusiawi*, yaitu kebutuhan manusia sebagai manusia berbudaya dan bukan sebagai sejenis individu atau nomor dalam masyarakat konsumen barang jadi. Tetapi toh kenyataan yang terdapat dalam proses modernisasi memang telah dan akan selalu menghasilkan keadaan-keadaan baru yang selalu berubah tetapi sama dalam hakekatnya: konsumsi barang jadi dan berkejaran dengan waktu untuk lebih banyak mendapatkan barang jadi untuk, sebagai dalih, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Fenomena ini tidak mungkin atau paling sedikit akan sulit diubah. Kita tidak akan hidup kembali di tengah hutan atau di tepi sawah ladang yang nyatanya makin habis itu. Yang bisa diubah adalah sikap kita, terutama generasi muda kita, untuk dapat menghadapi jaman konsumerisme dan, juga menurut Toffler, 1972, "the death of permanence" berakhirnya jaman serba tetap dan dapat diingat dengan mudah.

Peranan sekolah untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi jaman seperti ini jelas sangat besar. Peranan sekolah tidak boleh ketinggalan kereta api dengan kemajuan yang terdapat di luar sekolah. Dan mulainya peranan sekolah sebenarnya harus pada tingkat yang paling bawah, yaitu Taman Kanak-kanak. Mulai pada tingkat inilah penanaman nilai-nilai

sosial budaya nasional harus dimulai, disamping juga ditanamkannya sikap baru untuk tetap berpijak pada nilai-nilai nasional menghadapi jaman modern yang pada waktu anak-anak kecil itu sudah menginjakkan kakinya di sekolah menengah mungkin sudah berubah dengan makin derasnya pemakaian barang jadi berbagai macam. Juga perlu diperhatikan, bahwa masa anak-anak dari lahir sampai umur 6 tahun merupakan masa berkembangnya otak yang sangat perlu untuk modal dan alat mengembangkan budayanya.

Kalau kita lihat ke masa yang sudah lalu, kita sering kali bisa bertanya, mengapa justru pendidikan tinggi, baik pemerintah maupun swasta, mendapat perhatian begitu besar, sedang justru landasan yang paling fundamental, yaitu pendidikan pra-Taman Kanak-kanak dan juga pendidikan di Taman Kanak-kanak, kurang mendapat perhatian. Di kalangan para pendidik sudah diketahui, bahwa sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, Plato (Jowett 1892) telah mengajukan gagasannya bahwa pemerintah harus mempunyai peranan yang menentukan dalam pendidikan anak segera sesudah anak itu dapat dilepaskan dari susuan ibunya. Gagasan ini dengan jelas juga telah tertuang pada GBHN, di mana kedudukan dan pentingnya Taman Kanak-kanak disebut dengan tegas. Ini merupakan kemajuan sikap nasional, yang masih memerlukan penjabaran serta pelaksanaannya secara realistis dan sesuai dengan kondisi serta situasi di daerah-daerah yang dapat menunjang atau untuk sementara menunggu realisasinya.

Yang ingin saya ulangi di sini ialah penanaman nilai-nilai sosial budaya sebagai pegangan batin pada generasi muda, yang secara seimbang harus disertai dengan penanaman keahlian dan ketrampilan untuk hidup di jaman modern dan makin menuju ke arah industrialisasi atau setidaknya motorisasi serta mekanisasi ini. Ketrampilan tanpa pegangan nilai-nilai sosial budaya secara batiniyah akan menyebabkan individu-individu yang selalu ingin memperbaiki dirinya melalui pekerjaan yang lebih baik, dan penghasilan yang lebih baik, dan menjadi konsumen yang lebih agresif. Ini semua sudah dan masih dialami oleh masyarakat industriil di negara-negara Barat. Akhirnya

mereka menjadi bosan. Apa lagi yang dimiliki oleh seseorang yang serba punya stereosystem, mobil berlebihan jumlahnya, uang di kantong selalu tebal, TV berwarna, dapur dan peralatan rumah tangga mewah, lantai berkarpet, mobilitasi tinggi karena biaya selalu tersedia dan banyak tempat sudah dikunjungi, kalau bukan jiwa kosong kerdil yang mendambakan ajaran dari dukun, kyai, dan sebagainya? Pada dekade yang lalu, dan bahkan sampai sekarang juga, gejala ini berlaku di dunia barat, di mana para jembel palsu berkeliaran ke India, Nepal, Bali, dan sebagainya untuk mencari "peace of mind."

Akhirnya ada suatu masalah yang seringkali diketahui tetapi seringkali pula tidak diperhatikan. Yaitu fungsi pendidik sebagai faktor manusia pelaku yang menentukan dalam proses pendidikan. Baik dalam masyarakat yang sangat sederhana maupun dalam masyarakat yang maju, peranan pendidik sebagai sumber teladan tidak dapat diabaikan. Peribahasa "Mutiara itu biar keluar dari mulut anjing tetap mutiara juga" tidak dapat ditolerir dalam falsafah pendidikan secara Pancasilaistis. *Action morality* (moralitas tindakan) serta *agent morality* (moralitas pelaku) (lihat Oldenquist 1965) tidak dapat dipisah-pisahkan dari diri dan karakter pendidik. Pembinaan generasi muda tidak dapat mengabaikan peningkatan mutu pendidikanya.

Peranan pendidik sebagai pembina generasi muda harus menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yang, antara lain, menurut GBHN adalah untuk "..... menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa." Untuk mencapai tujuan ini pendidik perlu menghindari apa yang disebut Whithead 1960 sebagai "inert ideas", yaitu gagasan-gagasan yang hanya sekedar diterima jiwa tanpa dimanfaatkan, diuji, atau dikembangkan menjadi kombinasi-kombinasi baru. Oleh karena "inert ideas" inilah maka sering timbul kejenuhan berpikir yang hanya sekedar menganut isi buku serta kerutinan yang membosankan dan karenanya membuat pendidikan makin jauh dari sasarannya. Dan perlu disadari oleh pendidik, bahwa "inert ideas" ini timbulnya bukan dari siapa-siapa kecuali dari dirinya sendiri. Oleh karena itu daya

kreatif, inovatif, dan cepat memilih alternatif yang tepat perlu dimiliki oleh pendidik. Implikasinya ialah, bahwa pembinaan generasi muda juga tidak bisa dilepaskan dari pembinaan generasi pendidik-pendidiknya. Betapapun rapi dan mantapnya perencanaan pendidikan, kalau pelaku-pelakunya bertindak sebagai robot yang hanya berjalan apabila ditekan tombolnya, hasilnya pasti akan mengecewakan.

### **Peranan Masyarakat**

Nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk pribadi-pribadi anggota masyarakat itu. Selama nilai-nilai ini tidak atau belum sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya nasional sebagai idealisme normatif, maka akan terdapat benturan yang tidak menguntungkan. Hal ini bisa terjadi apabila pelaku-pelaku pembinaan dan pengembangan nilai-nilai nasional tidak atau kurang memahami situasi yang beranekawarna dalam masyarakat Indonesia. Menurut Bachtiar 1976: "Masyarakat kita mewujudkan tidak hanya satu melainkan sejumlah sistim aturan hukum. Masing-masing masyarakat daerah di kepulauan kita diatur oleh suatu sistim aturan hukum tersendiri, aturan-aturan adat masyarakat daerah yang bersangkutan. Ini adalah kenyataan dan kenyataan ini tidak tergantung pada pengesyahan atau pengakuan oleh Pemerintah." Dengan demikian kemungkinan benturan, baik yang kecil maupun yang besar, antara nilai-nilai nasional dengan nilai-nilai daerah selalu ada. Namun pada umumnya, kecuali pada peristiwa-peristiwa ekstrim yang sering hampir menggoyahkan nilai-nilai nasional, selalu terdapat jalan keluar yang bersifat toleran dan kompromistis untuk memecahkan problema-problema yang timbul karena perbedaan-perbedaan antara idealisme normatif nasional dan idealisme khas kelompok masyarakat tertentu. Ini berkat tidak saja sifat bangsa Indonesia yang ramah bersahabat, tetapi juga berkat peranan pimpinan masyarakat dan bimbingan dari pihak Pemerintah, dan lebih penting dan dalam dari itu semua ialah adanya pertemuan pendapat untuk tetap berpegang pada landasan pokok nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang bersumber pada asumsi dasar yang sama, yaitu UUD 45 dan jiwa Pan-

casilaistis serta kesediaan menerima kenyataan-kenyataan yang Bhinneka Tunggal Ika mewarnai hidup bangsa kita.

Kecuali itu pada tiap masyarakat terdapat apa yang disebut oleh Levi-Strauss 1967 sistem nomenklatur atau terminologi, yaitu himpunan istilah yang menyatakan berbagai hubungan keluarga dan kerabat serta sistem sikap, yaitu sikap yang timbul pada individu dan kelompok individu yang mempergunakan istilah itu dan yang terikat oleh kewajiban dalam antar-hubungan yang terjadi di antara mereka. Dalam pengertian ini, wajarlah apabila sistem nilai nasional sebagai idealisme normatif akan selalu dipandang dari kacamata khas yang terdapat dalam tiap masyarakat di kepulauan kita ini. Bertemunya persesuaian pendapat antara sikap nasional dan sikap masyarakat merupakan tanggungjawab Pemerintah tetapi sekaligus juga harus ditumbuhkan dalam masyarakat untuk dapat menerima nilai-nilai nasional secara sadar dan bertanggungjawab. Penerimaan secara sadar yang paling ideal ialah penerimaan yang dilakukan tanpa kehilangan identitas atau harga diri individu atau kelompok. Kesadaran berbangsa satu hanya akan berarti kalau ia simultan dengan kebanggaan berbangsa satu. Kebanggaan yang sejati biasanya menyangkut dimilikinya hal-hal yang khas oleh individu atau kelompok. Apakah hal-hal itu merupakan hasil ukiran, anyaman, tarian, prestasi olahraga, prestasi seni suara, keindahan alam, dan sebagainya tidak sangat penting diuraikan lebih lanjut. Tetapi pada dasarnya, apabila masyarakat merasa bangga memiliki sesuatu sebagai kekayaannya dan juga diakui sebagai kekayaan nasional, maka tubrukan norma daerah dan norma nasional dapat dihindari. Ini memerlukan pendidikan dan penyebaran informasi tidak saja pada masyarakat yang terbelakang mengenai kekayaan dan kekhasan sosial budayanya, tetapi juga bagi masyarakat yang lebih maju bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan suatu aspek sosial budaya kelompok yang terbelakang ini, ia adalah milik nasional dan bukan semata merupakan keprimitifan kelompok yang memilikinya.

Kekhasan yang terdapat pada masyarakat yang berbedabeda itu seyogyanya juga harus dimanfaatkan untuk "menterjemahkan" nilai-nilai sosial budaya nasional tanpa menyimpang

dari arti hakikinya, sehingga dengan demikian sosial budaya nasional menjadi kaya akan warna-warni yang toh mencerminkan suatu idealisme normatif yang sama. Ini hanya akan berhasil apabila melalui pembinaan generasi mudanya masyarakat-masyarakat di Indonesia diajak untuk sejauh mungkin berpartisipasi dengan segala keanekaragaman yang dimilikinya.

### **Beberapa Jalan Keluar**

Indonesia ditandai oleh berlimpahnya sinar matahari di alam yang terbuka. Hanya di kota-kota besar dan pada bagian-bagiannya yang sangat terbatas saja terdapat tata kehidupan tertutup di antara tembok pemisah dan di bawah atap gelap yang memerlukan penerangan khusus dan sistem pengaturan aliran udara dan suhu secara moderen. Manusia Indonesia pada dasarnya manusia yang hidup di alam terbuka, dan karenanya pertemuan dengan orang lain serta keramahatramahannya merupakan suatu syarat baginya untuk mengembangkan eksistensinya.

Sosial budaya Indonesia dengan demikian tidak dapat lepas dari keadaan alam seperti ini. Pemanfaatan berkembangnya sarana komunikasi dan mobilitas seyogyanya ditingkatkan dan dimanfaatkan untuk membina generasi muda untuk makin lebih baik mengenal dan mencintai alam serta sosial budaya masyarakat lain di luar daerahnya. Alam yang serba indah dan terbuka bisa dimanfaatkan untuk belajar hidup sederhana dan menempuh segala risiko serta membangkitkan semangat avonturisme dan pionirisme dalam arti yang positif. Dengan diubahnya sistem liburan sekolah di seluruh Indonesia, perlu ditingkatkan tidak saja pelayanan fasilitas perjalanan secara sederhana, murah, aman, dan tertib, tetapi juga pengadaan sistem penginapan secara prasaja serta terawasi secara bertanggungjawab. Di Jerman Barat, misalnya, sejak menjelang Perang Dunia Ke-I, yaitu pada tahun 1909, gagasan untuk mengadakan jaringan *Jugenderbergen* (penginapan pemuda) timbul untuk memerangi gejala kemandirian generasi muda karena meningkatnya fasilitas materialistis. Kiranya hal ini bisa dirintis di negeri kita ini. Dengan tujuan meningkatkan kecintaan pada

alam, pengertian dan toleransi yang lebih dalam terhadap adat istiadat orang lain, belajar berdiri sendiri dalam keadaan serba sulit dan terbatas, serta dapat juga untuk bekerja bakti untuk masyarakat yang didatangi, kiranya bermanfaat apabila di beberapa tempat yang strategis dapat didirikan semacam "youth hostel" yang kuat tetapi sederhana yang dapat dipakai khusus untuk menampung wisatawan pemuda pada waktu liburan. "Youth hostel" semacam ini hendaknya dikelola oleh pemerintah dengan menempatkan petugas pilihan yang bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan yang ketat.

Kecuali itu perlu dirintis usaha atau program nasional untuk memberi didikan praktis dan relevant dengan kebutuhan masyarakat setempat kepada generasi muda yang menganggur atau putus sekolah. Sistem apprenticeship dengan jenjang-jenjangnya sebagaimana yang terdapat di berbagai negara yang maju, mestinya, dengan penyesuaian seperlunya, dapat dilaksanakan secara bertahap di beberapa tempat yang cukup fasilitasnya. Program ini kalau dibebankan seluruhnya kepada pemerintah dalam segala hal pembiayaannya, kiranya akan menimbulkan masalah ketergantungan dan yang lebih jelek lagi malah mungkin menimbulkan sistem birokrasi baru. Oleh karena itu inisiatif swasta perlu dikembangkan. Di beberapa daerah yang sudah ada usaha-usaha swasta semacam itu, uluran tangan dari pemerintah sangat diperlukan.

Masih banyak lagi jalan yang dapat ditempuh untuk membina generasi muda dari segi sosial budaya. Napitupulu 1978 menyebut antara lain penggalan dan pengembangan *olahraga asli*. Pada waktu jaman Jepang kita melihat betapa pihak penguasa Jepang memakai berbagai cara untuk meningkatkan olahraga asli ini. Misalnya perang-perangan gajah, di mana seorang naik dan duduk di atas empat lengan dua orang yang disilangkan dan diletakkan pada bahu seorang lain di depannya, dan di mana satuan ini merupakan seekor gajah dan bersama-sama dengan gajah lain menyerang pasukan gajah lawan untuk menumbangkan bendera di puncak tiang bambu. Di samping olahraga asli, pengembangan olahraga "internasional" untuk mencapai prestasi yang tinggi perlu ditingkatkan.

Dalam menggali olahraga asli sebagai kekayaan budaya nasional itu diperlukan dana, dan, yang lebih penting, peranan aktif para kreator dan penggali potensi olahraga dan organisator yang baik serta penuh dedikasi. Kalau kita lihat di kampung-kampung jauh dari kota besar, sebenarnya banyak keaslian-keaslian bentuk kegiatan setengah permainan setengah olahraga, serta sifat kegotongroyongan yang bisa dimanfaatkan dan diarahkan untuk keperluan pembinaan generasi mudanya.

Suatu contoh yang menarik perlu disebutkan di sini. Belum berapa lama telah diadakan ujian tari Jawa di Museum Universitas Cenderawasih Jayapura, di mana di samping tarian secara penuh diuji, juga gerak dasar tari pria dan tari wanita Jawa diuji secara teliti. Ternyata hal ini telah dipetik sebagai pelajaran oleh seorang putra daerah untuk membakukan gerak dasar tari dari beberapa daerah di Irian Jaya. Pada waktu peringatan HUT RRI Jayapura hanya tiga bulan sesudah ujian tari Jawa itu, oleh putra daerah ini dipentaskan berbagai gerak dasar tari daerah tersebut, yang mendapat sambutan cukup memuaskan dari penonton asli maupun pendatang dari luar Irian Jaya. Sampai saat ini, dalam waktu yang relatif sangat singkat, yaitu empat bulan sesudah putra daerah tersebut belajar dari "melihat" ujian tari Jawa itu, telah dibakukan gerak dasar tari dari tujuh daerah Irian Jaya berupa notasi berbentuk stensilan. Ini merupakan gambaran nyata bahwa pembinaan generasi muda dapat dilakukan sekaligus untuk membina kebudayaan asli. Khazanah kebudayaan asli masih banyak yang belum digali. Dalam beberapa hal, penggalian ini bisa berupa penyajian persis seperti yang dianggap asli, atau, demi peningkatan mutu, berupa modifikasi dan kodifikasi seperti yang dilakukan di Irian Jaya di atas.

## PENUTUP

Biarpun secara teoritis ilmiah kita mungkin dapat memberi batasan pada nilai-nilai sosial budaya Indonesia melalui pengumpulan data dan penganalisaan serta prosedur ilmiah lainnya, tanpa asumsi dasar yang kuat dan terarah sebagai pegangan, identitas sosial budaya yang ditemukan seperti demikian hanya akan bermanfaat secara akademis dan layak dipolemikkan

belaka. Di samping itu kiranya kita perlu waspada, bahwa apa yang disebut ilmiah itu selalu erat dengan budaya manusia. Tanpa mengaitkan unsur manusia dan budayanya dalam disiplin ilmu pengetahuan apa pun, kita akan menempatkan ilmu lebih tinggi dari pada manusia yang mengembangkannya (lihat misalnya Znaniecki 1963).

Suka atau tidak suka, UUD 45 dan Pancasila telah terbukti sampai saat ini sebagai nilai-nilai normatif yang menjadi pegangan bagi sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu pembinaan generasi muda dipandang dari aspek sosial budaya tidak bisa lain kecuali dengan mempergunakan kacamata sosial budaya yang bersumberkan pada nilai-nilai normatif nasional, dan ini harus dilakukan sejak generasi muda itu masih dalam tingkat umur yang sangat awal.

Pendidikan yang ditujukan untuk membina sikap moderat perlu dimulai sejak anak lepas dari susuan ibunya. Ini memberi beban tanggungjawab kepada orang tua agar selalu berpikir dengan jernih, dan menghindari "tantrums" atau ledakan emosi yang berlebih-lebihan, yang pasti akan mempengaruhi bahkan mungkin ditiru oleh anaknya. Program radio, TV, serta media massa lain perlu meningkatkan daya analitis dan diskusioner terarah dengan tahapan-tahapan yang serasi, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa belajar mendahulukan fungsi daya pikirnya daripada emosinya. Sikap moderat hanya bisa dimiliki oleh orang yang berpandangan luas, dan pandangan luas selalu memerlukan persentuhan dengan alam pikiran orang lain dengan penuh pengertian dan toleransi, terbuka, dan sikap rasional.

Forum pertukaran pendapat dalam semua bidang keahlian (pertanian, pertukangan, kerajinan tangan, dsb.) seyogyanya ditingkatkan melalui pengaturan yang tepat agar forum tersebut mengenai sasaran, dan agar ekses-ekses berupa pemikiran liberalistis dan dialektis tanpa mampu menghasilkan cara pemecahan praktis dan bermanfaat bagi umum dapat dihindari. Nilai kerja kasar tanpa rasa malu perlu ditanamkan sejak anak masih kecil di keluarga melalui program gotong royong di kampung, RT, RW, dan sebagainya.

## ANALISA

Kebanggaan sebagai warga negara Indonesia perlu ditingkatkan melalui program pembinaan bakat dan prestasi serta peningkatan mutu nilai sosial budaya yang khas terdapat pada masyarakat. Dalam pengertian ini istilah "primitif" hanya berlaku untuk segi teknologi atau "finishing"-nya saja. Oleh karena itu segi-segi potensiil yang terdapat di daerah-daerah terbelakang perlu dipelajari dan ditingkatkan baik teknologinya maupun pemasaran/penyebarannya. Prestasi sebagai penyelesaian tugas dengan sebaik-baiknya perlu dibina.

Fungsi pendidik, apakah ia berupa orang tua, guru, dosen, kepala kantor, media massa, perlu dibina nilainya sebagai pemberi contoh. Di Indonesia, apabila ajaran atau contoh dari pendidik baik tetapi pendidik itu sebagai *agent* (pelaku) tidak baik, pendidikan sebagai proses pemindahan nilai-nilai akan terganggu kelancarannya. Bahkan di kota-kota kecil dan di daerah-daerah pedalaman, hal semacam itu malah akan bisa merusak sikap generasi muda sama sekali.

Buku-buku bacaan bagi anak-anak yang makin meningkat minat bacanya perlu diarahkan isinya untuk maksud membina mereka ke arah idealisme normatif nasional. Bahan-bahan bacaan tentang suri teladan tingkah laku serta budi pekerti perlu diutamakan daripada sifat kemisterian atau kedetektifan yang banyak menandai banyak buku bacaan seperti itu. Kepahlawanan dan kemenangan kebajikan terhadap kejahatan seyogyanya tidak dicampur-adukkan dengan penampilan bentuk ragawi serta sugesti hubungan kelamin sebagaimana sering nampak pada sementara media massa yang juga dibaca oleh anak-anak. Film-film yang berisi suri teladan hidup perlu ditingkatkan penyebarannya.

Masalah pembinaan generasi muda tidak dapat dibebankan pada salah satu atau beberapa Departemen saja. Seluruh aparat pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab sepenuhnya sebagaimana semua pemain musik pada suatu orkes simponi yang ingin menghasilkan lagu yang baik.

Kesempatan untuk membina generasi muda dalam dimensi waktu dan hidup manusia memang tidak ada batasnya. Tetapi apabila dalam Pelita III kita ingin melihat agar pembinaan generasi muda dilaksanakan secara berhasil sejauh mungkin, maka Pemerintah benar-benar harus menjawab tantangan ini. Ia akan menghadapi pertanggung jawaban tidak saja pada akhir periode jabatannya, tetapi juga pada generasi-generasi yang akan datang sebagai penanam tonggak sejarah yang betul atau keliru.

Masa kini, Bangsa Indonesia hidup dalam situasi di mana segala macam masalah membebani pemimpin-pemimpinnya. Secara simultan. Mempertengkarkan prioritas hanya akan menghasilkan kesimpang-siuran pendapat. Tetapi baiklah saya akhiri prasaran ini dengan truisme yang sudah lama dikenal: Barang siapa dapat membina generasi muda dengan sebaik-baiknya, ia akan mampu membina masa depan bangsanya.

#### BACAAN

1. Bachtiar, Harsja W., "Hukum di Masyarakat Indonesia", dalam *Berita Antropologi*, VIII/27:3—17. Jakarta : FSUI 1976
2. Van Eerde, J.C., *Inleiding tot de Volkenkunde van Nederlandsch Indie*, 1920 Haarlem
3. Gerbrands, A.A., *Wow-IPits*, The Hague : Mouton 1967a
4. Gerbrands, A.A., *The Asmat*, New York: The Museum of Primitive Art. 1967b
5. Huxley, T.H. dan Julian Huxley, *Evolution and Ethics (1893-1943)*, London : 1947 The Pilot Press Ltd.
6. Jowett, B., translator : Plato, *The Republic*, dalam Oldenquist 1892
7. Katz D. dan K. Braly, "Racial Stereotypes of one hundred college students", 1933 dalam *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 27:127-143
8. *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, 1978 11-23 Maret 1978. Surabaya : Penerbit Express
9. Levi-Strauss, Claude, *Structural Anthropology*, New York : Anchor Books 1967
10. Linton, Ralph, *The Study of Man*, New York : Appleton-Century 1936
11. Lubis, Mochtar, "Ceramah Budaya Mochtar Lubis", dalam *Sinar Harapan* 1977 XVI/5071, 9 April 1977

## ANALISA

12. Mosca, Gaetano, *The Ruling Class*, New York : McGraw-Hill  
1939
13. Napitupulu, W.P., "Kebijaksanaan Keolahragaan di Indonesia", dalam  
1978 *Prisma*, VII/4:17-24.
14. Oldenquist, A., Ed., *Readings in Moral Philosophy*, Boston : Houghton  
1965 Mifflin Company
15. Ongkokham, "Angkatan Muda dalam Sejarah dan Politik", dalam *Prisma*,  
1977 VI/12:15-24
16. Pendit, Njoman S., *Bhagavadgita*, Departemen Agama R.I. : Lembaga  
1967 Penyelenggara Penterjemah dan Penerbit Kitab Suci Weda  
dan Dharmmapada
17. Pike, K.L., "Toward a Theory of the Structure of Human Behavior", dalam  
1956 *Estudio Antropológicos publicados en homenaje al doctor  
Manuel Gamio*, Mexico : Sociedad Mexicana de Anthropologia
18. Budianta, Eka, "Dalam Membangun Generasi Muda Pembinaan Orang Tua  
1978 Juga Perlu" dalam *Sinar Harapan*, XVII/5312, 8 Februari 1978
19. Sudjoko, "Kebudayaan Massa", dalam *Prisma*, VI/6:3-12  
1977
20. Sylado, Remy, "Musik Pop Indonesia : Satu Kebebalan Sang Mengapa" dalam  
1977 *Prisma*, VI/6:23-31
21. Toffler, Alvin, *Future Shock*, New York : Bantam Books  
1972
22. Whitehead, Alfred Nort, *The Aims of Education*, New York : Mentor Book  
1960
23. Znaniecki, Florian, *Cultural Sciences*, Urbana : Illini Books  
1963